

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Demokrasi telah menjadi salah satu sistem pemerintahan yang paling dominan di dunia saat ini. Konsep ini didasarkan pada ide bahwa kekuasaan dan otoritas pemerintah berasal dari rakyat dan dijalankan untuk kepentingan mereka. Demokrasi menawarkan pengambilan keputusan yang inklusif, partisipatif, dan akuntabel, dengan penekanan pada hak asasi manusia, kebebasan sipil, dan keadilan sosial. Demokrasi mengajarkan bahwa kekuasaan berasal dari rakyat. Dengan pemahaman ini, rakyat akan membuat aturan yang menguntungkan dan melindungi hak-hak mereka. Untuk mewujudkannya, diperlukan sebuah peraturan bersama yang mendukung dan menjadi dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk menjamin dan melindungi hak-hak rakyat.<sup>1</sup>

Salah satu bentuk demokrasi di Indonesia yaitu pemilihan langsung baik eksekutif maupun legislatif. Indonesia menggunakan sistem pemilu proporsional dengan daftar terbuka, di mana pemilih dapat memilih partai dan juga calon legislatif secara langsung.<sup>2</sup> Pemilu di Indonesia meliputi pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Pemilu di Indonesia diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) KPU bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilu, sedangkan Bawaslu mengawasi pelaksanaan

---

<sup>1</sup> Affan Akbar dkk Perkembangan demokrasi di indonesia. Jurnal Vol 1 NO. 5 juli 2023

<sup>2</sup> Fajri Rahim Yusnedi dkk: "Analisis perbedaan sistem proporsional terbuka dan tertutup pada Pemilu di Indonesia". Jurnal of Education, Cultural and Politics Volume 4, No. 3, 2024

pemilu.<sup>3</sup> Beberapa tantangan yang dihadapi dalam pemilu di Indonesia meliputi politik uang, kampanye negatif, dan isu-isu terkait integritas pemilu. Upaya untuk meningkatkan kualitas pemilu terus dilakukan, seperti melalui reformasi hukum dan peningkatan partisipasi masyarakat.<sup>4</sup>

DPRD berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Daerah, sehingga mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat, dengan mengembangkan prinsip-prinsip good governance. Untuk menjalankan tugas dan fungsi Anggota DPRD mempunyai hak dan kewajiban yang telah diatur dalam Undang-Undang nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota atau dikenal dengan UU MD3 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Sebagai organisasi publik, DPRD seringkali mengalami dinamika dan perubahan akibat adanya perubahan lingkungan sehingga perlu ada proses adaptif dengan cepat sehingga fungsi dan peran DPRD dalam memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat tetap terlaksana secara lebih efektif, efisien, responsibility, kompetitif, dan adaptif.<sup>5</sup>

DPRD merupakan kependekan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Secara sederhana, DPRD merupakan bagian berasal wakil masyarakat yang menempati daerah tingkat I dan tingkat II, yaitu Provinsi, Kotamadya dan juga Kabupaten. DPRD terdapat di setiap Provinsi, Kota dan Kabupaten, yang dipilih setiap lima tahun sekali melalui pemilihan ketua Daerah, bersamaan menggunakan

---

<sup>3</sup> Website BPK RI <https://peraturan.bpk.go.id>

<sup>4</sup> Website KPU <https://www.kpu.go.id>

<sup>5</sup> Website Pemerintahan Kabupaten Banjarnegara <https://dprd.banjarnegarakab.go.id>

pemilihan Gubernur, Walikota dan Bupati di masing-masing daerah.<sup>6</sup> Suatu sistem demokrasi perwakilan yang diterapkan di Indonesia memiliki dinamika secara kelembagaan dimana membutuhkan adanya forum perwakilan rakyat ataupun biasa disebut DPRD selaku penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi prosedur penunjukan pejabat, penentuan kebijakan dan pertanggungjawaban seperti pengawasan. Terdapatnya kelembagaan perwakilan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah di Indonesia artinya perwujudan dari penerapan demokrasi yang mengutamakan kekuasaan paling tinggi terletak ditangan rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki wewenang menghasilkan Perda (peraturan daerah) beserta bupati/walikota, mengulas serta memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah menimpa APBD yang diajukan oleh Bupati/Walikota, serta kewenangan yang sama dengan pasal 336 UU Nomor 2 Tahun 2008.<sup>7</sup>

Kemudian sebagai bagian berasal dari lembaga pemerintah daerah, DPRD memiliki tanggung jawab yang sama dengan daerah. DPRD adalah mitra kerja dan sejajar dengan pemerintahan daerah. dengan kedudukannya tersebut, DPRD dilengkapi dengan beberapa tugas pokok serta fungsi, yaitu:

- a. Fungsi Legislasi yaitu membentuk Peraturan Daerah yang dilakukan bersama-sama Kepala Daerah

---

<sup>6</sup> Sekretariat DPRD Buleleng, 9 Tugas dan Fungsi DPRD di Indonesia <https://dprd.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/9-tugas-dan-fungsi-dprd-di-indonesia32>.Diakses pada 5 November 2022, pukul 15.20

<sup>7</sup> Alfiati, C. Optimalisasi Kinerja DPRD Dalam Pembentukan Peraturan Daerah” (Studi Kasus Di DPRD Kabupaten Malang Tahun 2019) .Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Malang 2020.hal 1. Diakses pada 6 November 2022, Pukul 10.06.

- b. Fungsi anggaran, yaitu Bersama kepala daerah menyusun dan menetapkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tiap tahun.
- c. Fungsi pengawasan, yaitu melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

Maria Magdalena merupakan anggota legislatif yang telah memenangkan pemilihan calon anggota legislatif sebanyak 4 periode, terhitung dari masa Pileg Kota Jambi pada tahun 2009, 2014, 2019, dan 2024. Beliau sendiri berasal dari Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P) dan berkompetisi tepat di daerah Alam Barajo. Maria Magdalena sendiri lahir di Jambi pada 26 Agustus 1976. Beliau sendiri lahir ditengah-tengah keluarga yang sederhana tanpa memiliki keluarga yang berstatus sosial pejabat pemerintahan atau tokoh masyarakat di Provinsi Jambi. Pada tahun 2005 beliau juga pernah berprofesi sebagai guru honorer di SMA Swasta Kota Jambi, mengingat lulusan sarjananya adalah jurusan sastra di salah satu Universitas Kota Bandung. Maria Magdalena memulai karir politiknya pada tahun 2007 menjadi kader partai politik PDI-Perjuangan. Hasil data yang diperoleh dari Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi, pada tahun 2009, 2014, 2019, dan 2024 Maria Magdalena, S.S berhasil menjadi anggota Legislatif Kota Jambi, saat ini Maria Magdalena menjabat sebagai ketua fraksi PDI-P DPRD Kota Jambi dan Sekretaris Komisi IV dibidang kesejahteraan sosial DPRD Kota Jambi. Maria Magdalena menjadi satu-satunya perempuan yang berhasil mencapai empat periode masa jabatan secara berturut-turut di DPRD Kota Jambi.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Website. Ramnews.id. <https://ramnews.id> diakses 14 April 2023

**Tabel 1.1 Daftar Suara Maria Magdalena Sebagai Anggota Legislatif  
Terpilih Kota Jambi.**

<b>No</b>	<b>Nama Caleg Terpilih</b>	<b>Tahun</b>	<b>Suara Sah</b>
1	Maria Magdalena, S.S	2009	1.307
2	Maria Magdalena, S.S	2014	2.687
3	Maria Magdalena, S.S	2019	2.882
4	Maria Magdalena, S.S	2024	1.794

Sumber : KPU

Dengan terpilihnya Maria Magdalena sebagai anggota legislatif empat periode berturut-turut dapat disimpulkan bahwa antusiasme dan harapan masyarakat Kota Jambi cukup tinggi terhadapnya. DPRD seolah telah menjadi tumpuan yang luar biasa atas berbagai persoalan kemasyarakatan. Karenanya, di setiap periode lima tahunan, yakni saat pemilu legislatif digelar, masyarakat menaruh ekspektasi atau harapan yang begitu besar. Sehingga, seiring berjalannya waktu selama periode jabatan sebagai wakil rakyat, DPRD secara kelembagaan maupun personal anggota DPRD dituntut untuk dapat menghasilkan kinerja yang optimal sehingga mampu memberikan rasa puas kepada masyarakat/konstituennya. Maka dari itu sangat penting untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap kinerjanya.

Maria Magdalena berhasil terpilih kembali sebagai anggota legislatif Kota Jambi 2019-2024 melalui strategi keterpilihannya memberikan dampak positif dan perkembangan yang signifikan, selain itu posisi Maria Magdalena sebagai anggota legislatif dapat menjadi inspiratif bagi perempuan lainnya untuk terjun ke dunia perpolitikan dengan elektabilitas yang baik dari Maria Magdalena tentunya

meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pembangunan. Maka dari itu maka peneliti akan menampilkan data program kerja yang telah di lakukan oleh Maria Magdalena di Kota Jambi sebagai berikut :

**Tabel 1.2 Program Kerja Maria Magdalena**

No	Program Kerja	Dokumentasi	Persentasi Terlaksana
1.	Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Kesehatan		96%
2.	Reses Maria Magdalena di Mayang Mangurai pada Tahun 2023 hingga saat ini aspirasi masyarakat Mayang Mangurai masih di prioritaskan		97%
3.	Pembangunan TK di Alam Barajo guna memberikan fasilitas dalam menunjang pendidikan sejak dini		99%
4.	Rapat paripurna tentang perda terbaru yaitu mengenai zonasi sekolah di DPRD Kota Jambi pada Tahun 2019		80%

5.	<p>Maria Magdalena dalam rapat mengajukan perda dan bantuan terhadap aksi eksploitasi anak di Kota Jambi dengan segala upaya akhirnya Maria Magdalena dapat memberantas para pelaku eksploitasi anak di bantu oleh dinas sosial Kota Jambi</p>		95%
6.	<p>Pertemuan Lanjutan dalam Perda No 5 Tahun 2019 tentang kesehatan mengenai evaluasi kinerja</p>		93%
7.	<p>Membantu UMKM masyarakat Kota Jambi Tahun 2024</p>		85%
8.	<p>Pertemuan Lanjutan untuk membahas hasil reses yang telah di laksanakan di Alam Barajo Tahun 2020</p>		80%

9.	Rapat bersama kepala Desa dan RT di Alam Barajo Tahun 2021 dalam rangka mengevaluasi kinerja terhadap hasil reses		89%
10.	Kegiatan acara pembukaan program kampung kreatif di pucuk Kota Jambi dalam rangka memberikan lapangan pekerjaan ke pada masyarakat akibat dari dampak penutupan akses prostitusi.		97%

Sumber : Dari arsip kegiatan Fraksi PDI-P Kota Jambi beserta Wawancara bersama Staff Pribadi Maria Magdalena.

Berdasarkan data di atas maka dapat dikatakan program kerja yang telah berhasil di raih oleh Maria Magdalena cukup menunjukkan bahwa kinerjanya tidak dapat di ragukan. Data yang peneliti lampirkan juga merupakan 25% dari data yang telah terlaksana dalam artian masih banyak data kinerja yang telah berhasil Maria Magdalena lakukan.

Penulis mengangkat beberapa penelitian terdahulu sebagai referensi dan salah satu acuan dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian ini.

Penelitian terdahulu yang di teliti oleh Eldaniel Siallagan yang berjudul Strategi Marketing Politik Maria Magdalena Pada Pemilihan Legislatif Kota Jambi Di Era Reformasi. Tujuan dari penelitian dikarenakan terjadinya kemenangan pada pemilihan umum legislatif selama tiga periode berturut-turut oleh Maria Magdalena

sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jambi. Hasil penelitian Eldaniel Siallagan menunjukkan bahwa Maria Magdalena melakukan strategi marketing politik melalui aktivitas politiknya dengan memasarkan sikap nasionalisme, etnis, dan pendekatan sosial sebagai produk lewat adanya media dan sosialisasi (*promotion*), perhitungan dana dan citra calon legislatif (*price*), membuat strategi penyebaran di daerah Kota Jambi. Selain itu, dalam kemenangan Maria Magdalena pada pemilihan umum legislatif Kota Jambi disebabkan juga dengan kerjasama tim yang baik dan sipak tata karma dalam bersosial tanpa menunjukkan rasa kaku antar perbedaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, artinya data yang di kumpulkan berasal dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo dan dokumen resmi lainnya.<sup>9</sup>

Perbedaan dengan penelitian ini adalah lebih memfokuskan penelitiannya terhadap bagaimana strategi politik pemenangan Maria Magdalena terpilih pada pileg 2009-2019 di Kota Jambi. Sementara dalam proposal ini, peneliti lebih memfokuskan penelitiannya terhadap bagaimana kinerja Maria Magdalena dalam periode terakhir di Tahun 2019-2024 sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Kota Jambi.

Penelitian terdahulu yang diteliti oleh Taufik Nurohman dan Wiwi Widiastuti mengkaji tentang Kinerja Anggota Dewa Perwakilan Rakyat Daerah (Studi Tentang Kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Perspektif Opini Publik di Kota Tasikmalaya). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam dan

---

<sup>9</sup> Eldaniel Siallagan, *Strategi Marketing Politik Maria Magdalena Pada Pemilihan Legislatif Kota Jambi Di Era Reformasi*, Skripsi, 2023

memperoleh gambaran secara deskriptif tentang untuk mengetahui opini publik tentang kinerja DPRD Kota Tasikmalaya sehingga Ketika para anggota DPRD Kota Tasikmalaya menunjukkan kinerja yang baik dan masyarakat cukup puas atas kinerjanya maka tidak menutup kemungkinan pada pemilu periode yang akan datang mereka akan dipilih kembali tetapi jika keadaannya menggambarkan kebalikannya maka sangat dimungkinkan para anggota dewan ini akan ditinggalkan dan tidak akan dipilih kembali oleh para pemilihnya pada pemilu periode yang akan datang.<sup>10</sup>

Adapun penelitian lain yang memiliki kesamaan tema dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Alpin Mandjoro yang berjudul Analisis Kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Di Kabupaten Poso. Penelitian oleh Alpin Mandjoro dilakukan bertujuan untuk mengetahui kinerja DPRD Kabupaten Poso Kabupaten Poso periode 2014-2019 dalam melaksanakan fungsi legislasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja DPRD Kabupaten Poso periode Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja DPRD Kabupaten Poso periode 2014-2019 dalam melaksanakan fungsi legislasi sudah optimal dilaksanakan. Beberapa aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada DPRD Poso telah ditindaklanjuti DPRD dengan menetapkan beberapa peraturan daerah. Fungsi DPRD Kabupaten Poso sebagai regulator mampu menjembatani berbagai konflik kepentingan antar

---

<sup>10</sup> Suwardi dan Aris Tri Haryanto: "HUBUNGAN PERSEPSI KINERJA PEMERINTAHAN DENGAN KETERPILIHAN CALON PASANGAN PETAHANA DI PILKADA SALATIGA 2017". Jurnal Transformasi Vol.1 Halaman 1 – 59 Tahun 2017

kelompok masyarakat atau antara kelompok masyarakat dengan Pemerintah Daerah telah terpenuhi. Fungsi tanggung jawab DPRD sebagai penyambung aspirasi masyarakat di Kabupaten Poso belum optimal. Kegiatan proses penyusunan, pembahasan dan pembahasan dan penetapan Raperda menjadi Perda yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Poso tidak sesuai dengan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, sehingga dalam menjalankan fungsi legislasi daerah belum sesuai dengan tugas, wewenang dan program DPRD.<sup>11</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin melihat dari dua hal yaitu mengenai kinerjanya dan bagaimana komunikasi Maria Magdalena dalam penyampaian pelaksanaan tugasnya sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Kinerja Anggota Legislatif Perempuan “Maria Magdalena” Sebagai Anggota Legislatif Kota Jambi Periode 2019-2024”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah yang diajukan adalah :

1. Bagaimana pola komunikasi Maria Magdalena dalam pelaksanaan tugasnya?
2. Bagaimana kinerja Maria Magdalena sebagai anggota legislatif di periode ke 3 Tahun 2019-2024 di Kota Jambi?

---

<sup>11</sup> Alpin Mandjoro, Analisis Kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Di Kabupaten Poso, Skripsi, 2018.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pola komunikasi yang digunakan Maria Magdalena dalam melaksanakan kerjanya sebagai anggota legislatif perempuan di Kota Jambi.
2. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis kinerja Maria Magdalena sebagai anggota legislatif Kota Jambi di periode ke tiga, Tahun 2019-2024.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Pembaca, Akademisi, dan Peneliti lainnya. Manfaat penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Secara Akademis

Secara Akademis, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi peningkatan kinerja organisasi sektor publik (DPRD) khususnya DPRD Kota Jambi dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah untuk mewujudkan *good governance*.

2. Secara Praktis

Secara praktis, diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi DPRD Kota Jambi untuk :

- a. Memberi masukan yang konstruktif dalam rangka meningkatkan kinerja DPRD dalam melaksanakan fungsinya baik fungsi legislasi, anggaran dan fungsi pengawasan.
- b. Memberi sumbangsih pemikiran dalam pengembangan strategi dan mekanisme peningkatan kinerja DPRD pada masa yang akan datang.

## **1.5 Landasan Teori**

Teori merupakan landasan bagi penulis dalam menganalisa fakta yang terdapat di lapangan. Beberapa pendapat para ahli yang akan digunakan dalam pendeskripsian indikator dan mengidentifikasi fakta lapangan, menjadi media bagi peneliti dalam pemecahan fakta-fakta di lapangan. Berikut teori yang akan digunakan peneliti, yaitu:

### **1.5.1 Teori Kinerja**

Menurut Moeheriono kinerja (*performance*) merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang dituangkan melalui perencanaan strategis suatu organisasi. Sedangkan menurut Wexley dan Yulk kinerja merupakan implementasi dari teori keseimbangan, yang mengatakan bahwa seseorang akan menunjukkan prestasi yang optimal bila ia mendapatkan manfaat (*benefit*) dan terdapat rangsangan (*inducement*) dalam pekerjaannya secara adil dan masuk akal (*reasonable*). Dan Mangkunegara menyatakan kinerja yaitu hasil kerja secara kuantitas dan kualitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Menurut M. Abdullah kinerja adalah prestasi kerja yang merupakan hasil dari implementasi rencana kerja yang dibuat oleh suatu institusi yang dilaksanakan oleh pimpinan dan karyawan (SDM) yang bekerja di instansi baik pemerintah maupun perusahaan (bisnis) untuk mencapai tujuan organisasi. Dan Menurut Simanjuntak kinerja adalah tingkatan pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas tertentu. Sependapat menurut Wilson Bangun kinerja adalah hasil pekerjaan yang dicapai

seseorang berdasarkan persyaratan pekerjaan. Dan kemudian pengertian kinerja yang dikemukakan oleh Veitzhal Rivai, menyatakan bahwa kinerja merupakan suatu istilah secara umum yang digunakan untuk sebagian atau seluruh tindakan atau aktivitas dari suatu organisasi pada suatu periode dengan referensi pada sejumlah standar seperti biaya-biaya masa lalu atau yang diproyeksikan, dengan dasar efisiensi, pertanggung jawaban atau akuntabilitas manajemen dan semacamnya.<sup>12</sup>

Kinerja anggota legislatif merupakan salah satu faktor penting yang dapat dilihat dalam keberhasilan mereka dalam menjadi anggota legislatif. Beberapa indikator yang sering digunakan untuk mengukur kinerja organisasi publik menurut Dwiyanto yaitu : Produktivitas, Responsivitas, Responsibilitas dan Akuntabilitas.<sup>13</sup>

1. Produktivitas identik dengan pengukuran efisiensi dan efektivitas dalam sebuah kegiatan pelayanan. Nangoy et al mengatakan bahwa produktivitas adalah sikap mental yang memiliki sudut pandang dimana saat ini akan lebih baik dari kemarin. Dari definisi tersebut terlihat bahwa adanya sikap dan upaya untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya.
2. Responsivitas merupakan sebuah keinginan organisasi dalam menyusun agenda-agenda yang diprioritaskan kearah pelayanan yang diharapkan masyarakat. Selain itu, responsivitas juga menggambarkan bagaimana program yang dibuat dan dilaksanakan selaras dengan kegiatan yang dilakukan.

---

<sup>12</sup> Magda Mokosolang, "Pengaruh Profesionalisme Pegawai Terhadap Kinerja Pegawai Dinas Kesehatan Dalam Pencegahan Penularan Covid-19 di Kabupaten Minahasa Tenggara". JURNAL GOVERNANCE. Vol.1, No. 1, 2021.

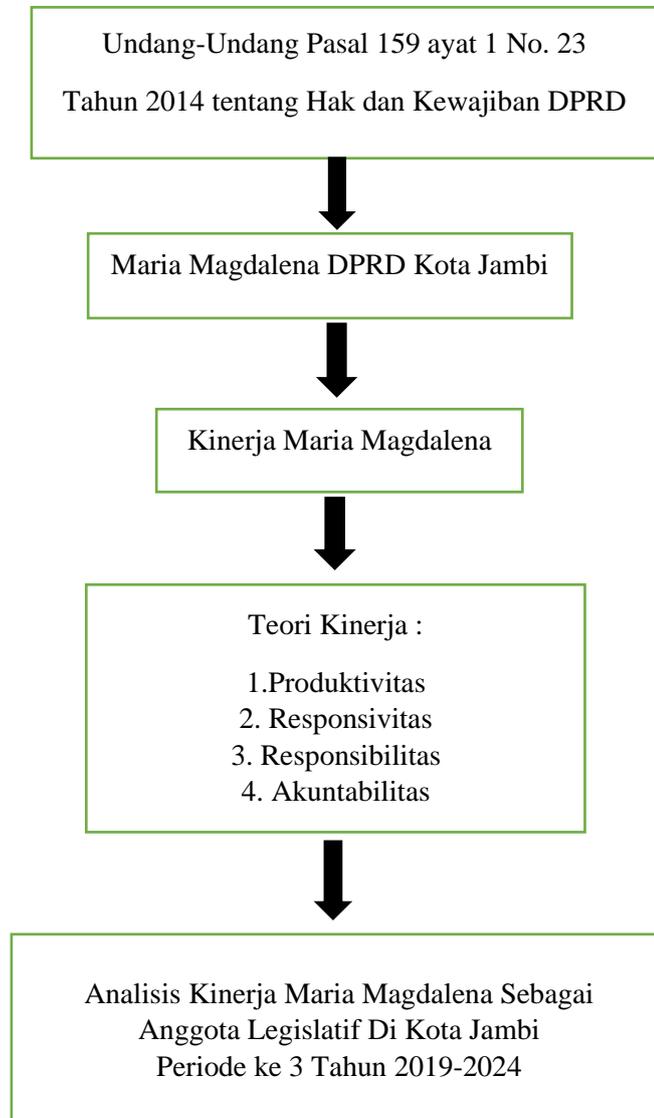
<sup>13</sup> Dedy Afrizal, Dkk: 'Produktivitas, Responsivitas, Responsibilitas, dan Akuntabilitas pada Dinas Perhubungan Kota Dumai', Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau, Vol.1, No.1, Januari-Juni 2021, hlm 62

3. **Responsibilitas** menjelaskan bagaimana organisasi publik yang ada menjalankan aktivitasnya sesuai dengan prinsip administrasi yang benar dan sesuai dengan kebijakan dari organisasi tersebut
4. **Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah** merupakan salah satu tanggung jawab dari alat ukur keberhasilan dari sebuah misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara berkala. Akuntabilitas juga dapat diwujudkan sebagai rasa tanggung jawab yang konsistensi terhadap keberadaan organisasi tersebut bagi kesejahteraan masyarakat.

Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akuntabilitas kinerja kelembagaan perwakilan rakyat dapat diwujudkan dalam bentuk pernyataan, gagasan, usulan pemikiran, anggapan atau pandangan atas suatu peristiwa, tanggapan atas aspirasi publik, dan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi. Dalam Penjelasannya dikatakan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi (dapat dicontohkan) berupa keberhasilan DPR dalam mewujudkan Undang-Undang sebagaimana diusulkan dalam program legislasi nasional.

## 1.6 Kerangka Pikir



**Gambar 1.1 Kerangka Pikir**

Untuk memudahkan penulis dalam merancang dan menjelaskan maksud serta tujuan penelitian ini, di perlukan suatu panduan berupa kerangka pikir yang dapat di gunakan sebagai pedoman dalam menguraikan permasalahan yang sedang di teliti, seperti kerangka pikir yang telah di tampilkan di atas.

Pada penelitian ini dirujuk dari Undang – Undang Pasal 159 ayat 1 No. 23 Tahun 2014 tentang Hak dan Kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) . Berdasarkan rujukan tersebut, maka penelitian ini mengarah pada kinerja Maria Magdalena sebagai anggota legislatif di Kota Jambi periode ke tiga pada Tahun 2019-2024.

### **1.7 Metode Penelitian**

Pada hakikatnya, metode penelitian adalah tahapan-tahapan ilmiah yang diterapkan untuk memperoleh informasi untuk mencapai target penelitian atau kebermanfaatan yang telah ditetapkan. Tahapan ilmiah ini bermakna aktivitas penelitian dilaksanakan menurut kriteria-kriteria keilmuan, yakni: empiris, rasional, dan sistematis. Rasional berarti penelitian dilaksanakan dengan berpedoman pada tahapan-tahapan yang logis, sehingga dapat disetujui pembaca.

Sementara itu, empiris bermakna langkah-langkah penelitian tersebut dapat diperhatikan melalui panca indera manusia, sehingga peneliti selanjutnya dapat mengulang kembali langkah tersebut di penelitiannya atau memodifikasinya agar memperoleh penemuan baru. Adapun yang dimaksud dengan sistematis ialah

kegiatan penelitian dilaksanakan melalui tahapan tahapan yang tertata dengan baik dan benar.<sup>14</sup>

### **1.7.1 Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Penggunaan metode penelitian kualitatif adalah untuk menganalisis secara lebih mendalam mengenai fenomena atau masalah yang ada dilapangan. Dengan metode kualitatif, data yang tidak dapat diolah atau dianalisis dengan prosedur statistik dapat dianalisis lebih mendalam menggunakan metode ini.<sup>15</sup> Sehingga dengan metode ini peneliti dapat menganalisis lebih mendalam terkait hasil kinerja dari Maria Magdalena selama menjabat sebagai anggota legislatif di Kota Jambi selama empat periode berturut-turut dari Tahun 2009-2024.

### **1.7.2 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini merupakan lokasi yang sangat tepat dalam melakukan penelitian. Penentuan lokasi yang tepat sangat di perlukan guna mempertanggung jawabkan data yang di peroleh. Penelitian ini di lakukan di Kota Jambi.

### **1.7.3 Fokus Penelitian**

Agar peneliti dapat memahami penelitian yang di lakukan dan dapat mencapai tujuan penelitian yang telah di susun, maka penelitian ini berfokus dengan melihat bagaimana hasil kinerja dari Maria Magdalena selama menjabat sebagai anggota legislatif di Kota Jambi, mengingat Maria Magdalena telah berhasil

---

<sup>14</sup> 8 Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2017. hlm 2.

<sup>15</sup> Sugiyono, Memahami penelitian Kualitatif (Alfabeta, Bandung, 2016), cet. 12, hlm. 2-3

mempertahankan jabatannya sebagai anggota legislatif selama empat periode berturut-turut.

#### **1.7.4 Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari :

##### **a. Sumber Data Primer**

Sumber data primer merupakan sumber data yang di peroleh dengan mewawancarai secara langsung dari sumber asli atau informan untuk mendapatkan data atau informasi secara faktual. Sumber data primer di dalam penelitian ini merupakan informan yang menguasai dan memahami mengenai Kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).<sup>16</sup>

##### **b. Sumber data sekunder**

Sumber data sekunder adalah bahan pendukung penelitian dalam memudahkan penelitian. Data sekunder bersumber dari buku-buku jurnal atau skripsi dan penelitian – penelitian terdahulu yang telah di publikasikan. Pada penelitian ini data sekunder yang di gunakan yaitu teori dari buku, jurnal/skripsi, dan data pendukung lainnya.<sup>17</sup>

#### **1.7.5 Teknik Penentuan Informan**

Teknik yang digunakan dalam penarikan sampel dalam hal ini informan adalah Purposive Sampling, dengan teknik ini pengambilan sampel sumber dilakukan dengan pertimbangan tertentu.<sup>18</sup> Tujuan penggunaan teknik ini adalah untuk memperoleh informasi yang jelas, akurat dan dapat dipercaya sehingga data

---

<sup>16</sup> *Ibid*

<sup>17</sup> *Ibid. hlm 418*

<sup>18</sup> *Ibid. hlm. 419.*

yang diperoleh dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang peneliti angkat untuk menjadi pertimbangan dalam pengambilan kesimpulan.

**Tabel 1.3 Daftar Informan Penelitian**

<b>No</b>	<b>Informan</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Keterangan</b>
1	Maria Magdalena, S.S	Anggota DPRD Kota Jambi Komisi IV	Informan utama yang akan memberikan wawasan langsung mengenai kebijakan dan pengalaman selama menjabat sebagai DPRD di Kota Jambi.
2	Drs.Noviarman, ME	Sekretaris DPRD Kota Jambi.	Dapat memberikan informasi mengenai proses administratif dan kinerja Maria dalam konteks organisasi DPRD.
3	Junedi Singarimbun, S.E	Mantan Anggota DPRD Kota Jambi periode 2009-2019.	Memberikan perspektif tentang kolaborasi dan dinamika kerja di antara anggota DPRD.
4	DJOKAS SIBURIAN, S.E.	Anggota DPRD Kota Jambi	Memberikan perspektif tentang kolaborasi dan dinamika kerja di antara anggota DPRD.
5	Tegar Arif	Pegawai Dinas Pendidikan.	Dapat memberikan perspektif tentang implementasi kebijakan pendidikan yang diusulkan oleh DPRD, termasuk Maria Magdalena.
6	Rajip Virza	RT Alam Barajo	Masyarakat
7	Astuti	Ketua Pkk di Mayang Mangurai	Masyarakat
8	Budiono	Tokoh Masyarakat Adat	Masyarakat
9	Yunita Indrawati	Kepala Dinas Sosial Kota Jambi	Dapat memberikan Informasi valid di karenakan saling bekerja sama dengan Maria Magdalena dalam upaya memberantas eksploitasi anak

Sumber : Olahan Penulis

### **1.7.6 Teknik Pengolahan Data**

Dalam penelitian ini Teknik pengumpulan data dilakukan melalui 2 cara yaitu:<sup>19</sup>

#### **a. Wawancara**

Memperoleh data dengan cara peneliti menanyakan beberapa butir pertanyaan yang telah di susun kepada responden secara langsung yang bertujuan agar peneliti memperoleh informasi yang di sesuai dengan penelitian.<sup>20</sup>

#### **b. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah suatu teknik pemerolehan data atau informasi berupa buku, arsip/dokumen, artikel ilmiah, naskah, gambar, dan lain sebagainya sebagai laporan yang di sertai dengan penjelasan yang berkaitan dengan tema penelitian dan menunjang penelitian yang sedang di lakukan dan tentunya dapat membantu mendukung argumen-argumen peneliti.<sup>21</sup>

### **1.7.7 Teknik Analisi Data**

Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi :

#### **a. Reduksi Data**

Dalam reduksi data perlunya dilakukan pemilihan data yang relevan agar dapat menjadi jawaban dari pertanyaan penelitian, karna data yang di dapatkan dari hasil wawancara dan dokumentasi.

#### **b. Penyajian Data**

---

<sup>19</sup> *Ibid hlm.1*

<sup>20</sup> Irawan Soehartono, Metode Penelitian Sosial, ( Bandung : Remaja Rosda 2011 ), hlm 67

<sup>21</sup> Arikunto, S. (2016). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta : Rineka Cipta, hlm 199

Dalam tahap penyajian data, maka data di sajikan dalam bentuk narsi deskriptif. Kemudian setelah data secara rinci di sajikan selanjutnya data tersebut di bahas.

c. Penarikan Kesimpulan

Dalam tahap ini adalah tahap pengambilan kesimpulan. Tujuannya untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini secara singkat di bahas.

### **1.7.8 Keabsahan Data**

Trigulasi merupakan suatu pendekatan yang menggunakan beragam sumber, metode, penelitian dan teori agar dapat menyediakan bukti pendukung yang di gunakan untuk validasi dari sumber yang beragam. Trigulasi dengan sumber yang dilakukan pengecekan data berupa proses wawancara berulang – ulang dengan mengajukan pertanyaan dan melampirkan dokumentasi. Teknik trigulasi data dalam penelitian kualitatif dibagi berdasarkan data yang di periksa, adapun teknik trigulasi data yaitu :

- 2 Trigulasi sumber ( *Data Trigulation* ), yang berarti menggunakan berbagai sumber data dalam penelitian.
- 3 Trigulasi Penelitian ( *Investigator Trigulation* ), yang berarti menggunakan beberapa peneliti dari berbagai disiplin ilmu dalam suatu penelitian.
- 4 Trigulasi metodologis ( *Methodologi Trigulation* ), yang berarti menggunakan sejumlah perspektif metodologis dalam suatu penelitian.